

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau *literature review* adalah eksplanasi lengkap yang di dalamnya mencakup teori, temuan, dan juga bahan penelitian yang diperoleh penulis yang selanjutnya dijadikan landasan dalam mengkaji sumber-sumber oleh penulis di dalam penelitian. Berkaitan dengan itu, tinjauan pustaka terdahulu dipergunakan oleh penulis dalam membuat kerangka pemikiran pada rumusan masalah dan permasalahan yang sedang diteliti. Fungsi dari tinjauan pustaka ini juga bisa untuk menjelaskan secara rinci dari variabel bebas, variabel terikat, serta korelasi antar keduanya. Penulisan skripsi yang merupakan sebagai salah satu karya ilmiah, sangat terbantu dengan adanya tinjauan pustaka. Tidak hanya itu, adanya tinjauan pustaka juga dapat menghindari adanya tindakan plagiarisme. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan informasi dari sebagian tulisan yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang diteliti penulis yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, sumber *online*, dan berita resmi.

Kerja sama Uni Eropa dan China dalam mengatasi perubahan iklim telah beberapa kali menjadi topik pembahasan dalam berbagai macam literatur akademik yang ditulis oleh berbagai macam kalangan antara lain, kalangan peneliti, akademisi, pemerintah serta lembaga non-pemerintah. Pada kajian literatur atau penelitian tersebut, tentu memiliki perspektifnya masing-masing yang didasari oleh kerangka pemikiran yang dipergunakan dalam menulis penelitian atau kajian

literatur tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tinjauan pustaka sebagai kerangka yang dibangun untuk mengategorikan sumber data serta informasi umum yang dikaji dalam penelitian.

Menurut The Royal Society (2020) menggambarkan gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, menyerap panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Ketika konsentrasi gas-gas ini meningkat di atmosfer, mereka menyebabkan efek pemanasan global dengan menangkap lebih banyak panas. Sejak tahun 1900, suhu rata-rata permukaan global mengalami peningkatan dan menunjukkan bahwa pemanasan yang terjadi selama periode tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Jika emisi gas-gas ini terus berlanjut, akan menyebabkan perubahan iklim lebih lanjut, termasuk kenaikan yang signifikan dalam suhu rata-rata global dan perubahan penting dalam iklim di berbagai regional. Selanjutnya perubahan jumlah gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim, hal ini dibuktikan bahwa konsentrasi gas-gas ini di atmosfer telah meningkat dan masih meningkat dengan cepat, bahwa perubahan iklim sedang terjadi, dan bahwa sebagian besar perubahan baru-baru ini hampir pasti disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia (The Royal Society, 2020).

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh Riedy (2016), dimulai dari sejak Revolusi Industri, emisi gas rumah kaca manusia dari pembakaran bahan bakar fosil, praktik pertanian dan penggundulan hutan telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim yang dicermati dan diantisipasi termasuk adanya suhu yang lebih tinggi, perubahan pola curah hujan, perubahan frekuensi, kenaikan permukaan laut dan dampak konsekuensi pada sistem

manusia dan alam. Tidak sedikit ilmuwan yang berpendapat bahwa dampak perubahan iklim akan menghancurkan sistem alam dan manusia serta ancaman eksistensi bagi peradaban manusia. Perubahan iklim menarik perhatian pada hubungan antara masyarakat, menantang lembaga tata kelola global, dan memicu gerakan sosial baru. Selanjutnya adanya proses penyesuaian terhadap perubahan iklim, yang mana manusia mengambil tindakan untuk menghindari dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang bermanfaat, dengan pengurangan emisi gas rumah kaca manusia untuk mengurangi tingkat perubahan iklim dan beralih pada suatu kesepakatan atau kerja sama yang lebih mudah dikelola. Hal ini mengejar tindakan untuk menanggapi perubahan iklim di tingkat lokal, regional, nasional serta internasional yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis di berbagai sektor dan di dalamnya merupakan seruan untuk tata kelola perubahan iklim yang lebih terdistribusi, di mana beragam aktor memiliki peran untuk dimainkan (Riedy, 2016).

Froggatt & Quiggin (2021) mengidentifikasi bagaimana China, Uni Eropa dan Amerika dapat menyelaraskan strategi untuk bekerja sama dalam bidang iklim dan energi dengan lebih baik. Selanjutnya, para peneliti membahas mengenai upaya mengatasi krisis iklim secara kritis dan nyata harus membutuhkan kerja sama, dan konsistensi. Diplomasi iklim antara China, Uni Eropa dan Amerika Serikat berada dalam fluktuasi yang lebih besar karena adanya pergeseran yang muncul menuju mekanisme aksi iklim atas barang-barang dengan kandungan karbon. Selain itu, mereka memprioritaskan pendekatan yang berbeda seperti paket stimulus hijau, undang-undang atau peraturan untuk mempercepat transisi menuju masyarakat rendah karbon. Karena adanya pergeseran dari pemerintahan AS yang

baru terdapat usulan-usulan seperti pengenalan pajak impor atas barang-barang yang mengandung karbon yang masuk ke Uni Eropa. Meskipun kebijakan untuk mengurangi emisi gas karbon ini cenderung mempunyai sifat yang jangka panjang, membutuhkan stabilitas dan konsistensi tetapi Uni Eropa telah mencapai hal ini, di seluruh Komisi Eropa berturut-turut, menghasilkan target mitigasi yang lebih serius dan kepemimpinan global dalam penerapan teknologi rendah karbon (Froggatt & Quiggin, 2021).

Gurol & Starkmann (2021) mengemukakan bagaimana perubahan peran telah berkontribusi bagaimana perubahan peran telah berkontribusi pada kerja sama yang lebih erat antara UE dan China dalam tata kelola iklim. Menggunakan teori peran, dan bertujuan untuk mengisi kesenjangan analitis sebagai peralatan konseptual yang dikembangkan dengan baik dan telah digunakan untuk menganalisis perilaku kebijakan luar negeri aktor tunggal dan bukan kerja sama antar aktor. Analisis tersebut mengungkapkan tiga peristiwa penting yang berkontribusi pada peningkatan baru-baru ini dalam kerja sama iklim dan perkembangan dari teknis ke kerja sama politik, meskipun ada kendala politik secara keseluruhan dalam hubungan Uni Eropa – China. Titik kritis pertama yang dianalisis menggunakan teori peran adalah COP 2009, yang mengarah pada adaptasi peran-peran Uni Eropa sebagai pembangun jembatan yang melengkapi klaim kepemimpinannya dalam tata kelola iklim internasional. Titik kritis yang kedua adalah *Paris Agreement*, yang menjadikan perubahan peran China dari pengambil kebijakan atau bahkan negator terhadap perubahan iklim. Dan titik kritis yang ketiga adalah penarikan Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, yang menciptakan kekosongan kepemimpinan, membuka jendela peluang bagi Uni Eropa dan China untuk menyesuaikan kembali

posisi mereka dalam mendorong kerja sama Uni Eropa-China, menegaskan kembali keinginan mereka untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris dan untuk bekerja sama dalam perubahan iklim dan sistem tata kelola iklim internasional (Gurol & Starkmann, 2021).

Nuraulia (2018) menjelaskan Cina, dengan produksi emisi gas karbonnya, menempatkannya sebagai negara terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat. Cina dalam upaya menurunkan emisi gas karbonnya sepakat untuk meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 1998 sehingga Cina mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi gas karbon setidaknya 5%. Salah satu upaya yang dilakukan Cina dalam menanggulangi perubahan iklim berupa pemangkasan emisi gas yaitu melalui program kerja sama bersama Uni Eropa yakni program *Near Zero Emission Coal* (NZEC) yang menjadi keseriusan negara China dalam aksi perubahan iklim. Dalam penerapan program tersebut, dana yang diberikan oleh Uni Eropa ialah sebesar €980 juta guna melakukan penerapan program dan setiap tahunnya meningkat. Pada kerja sama dalam program ini, China dituntut untuk mengembangkan energi alternatif guna membantu pengurangan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar listrik di China. Para masyarakat China pun mulai berkontribusi untuk tindakan nyata aksi perubahan iklim yang bisa membantu pemerintah China menurunkan emisi gas karbon di China yaitu dengan menggunakan energi alternatif yang berupa pembangkit listrik tenaga surya (Nuraulia, 2018).

Pazli (2014) memaparkan bahwa prioritas utama pemerintah China adalah pembangunan ekonomi dengan mempromosikan industrialisasi. Sektor industri di China sendiri sangat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonominya.

Tetapi dikarenakan kegiatan industri ini mengakibatkan adanya degradasi lingkungan dengan meningkatnya emisi karbon seiring meningkatnya konsumsi energi batu bara. Di tengah dilema ini, pemerintah China bersama dengan Uni Eropa melakukan kerja sama dalam program *Near Zero Emission Coal* (NZEC) dan terdapat motivasinya yaitu agar dapat melakukan kepentingan transfer teknologi *Carbon Capture and Storage* yang memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menangkap karbon dioksida dari sumber-sumber besar emisi dan juga kegiatan industri yang di dalamnya menggunakan batu bara sebagai energi baik pada pembangkit listrik atau industri di China masih bisa tetap dilakukan. Selanjutnya adanya bantuan modal dan peluang pasar di Eropa yang mana kepentingan-kepentingan itu mendukung pemerintah untuk mengemban dan melangsungkan pembangunan tanpa dikhawatirkannya adanya emisi-emisi yang terlalu berlebihan dalam sektor industri (Pazli, 2014).

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian

Nama Penulis & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
<i>The Royal Society</i> , 2020.	<i>Climate Change Evidence & Causes</i>	<p>Persamaannya terletak pada pernyataan bahwa konsentrasi gas-gas di atmosfer telah meningkat dan sebagian besar hampir disebabkan oleh aktivitas manusia. Dilanjut dengan akibat yang terjadi dari perubahan iklim.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada aspek pembahasan yang mana pada sumber ini hanya membahas perubahan iklim secara global saja, sedangkan penulis lebih menekankan penyebab perubahan iklim yang terjadi akibat emisi dari Uni Eropa & China.</p>
Christ Riedy, 2016.	<i>Climate Change.</i>	<p>Persamaannya terletak pada pernyataan yang menggambarkan emisi gas rumah kaca manusia berasal dari bahan bakar fosil, dan</p>	<p>Perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana sumber ini hanya membahas sampai tindakan perubahan iklim dalam tingkat</p>

Nama Penulis & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<p>perubahan iklim yang bisa dikurangi dampak negatifnya dengan memanfaatkan pada suatu kesepakatan atau kerja sama secara global.</p>	<p>internasional, sedangkan penulis lebih menekankan pada kerja sama yang lebih spesifik yaitu Uni Eropa & China.</p>
<p>Antony Froggatt dan Daniel Quiggin, 2021.</p>	<p><i>China, EU and US cooperation on climate and energy.</i></p>	<p>Persamaannya terletak pada penyelarasan strategi untuk bekerja sama dalam bidang iklim.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada penelitian ini mengaitkan amerika dalam menyelaraskan strategi untk bekerja sama dalam bidang iklim dan energi, sedangkan penulis hanya mengkaji kedua pihak saja yaitu Uni Eropa & China.</p>

Nama Penulis & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Julia Gurol dan Anna Starkmann, 2021.	<i>New Partners for the Planet? The European Union and China in International Climate Change Governance from a Role-Theoretical Perspective.</i>	Persamaannya terletak pada pernyataan yang menjelaskan bahwa Uni Eropa bekerja sama dengan China dalam aspek perubahan iklim.	Penelitian ini meneliti bagaimana kerjasama Uni Eropa dan China dalam tata kelola iklim internasional dengan menggunakan perspektif teori peran, sedangkan penulis menggunakan pendekatan politik hijau dan pilihan rasional sebagai acuan.
Dessy Nuraulia, 2018.	Kerjasama Cina - Uni Eropa Dalam Program <i>Near Zero Emission Coal</i> (NZEC) tahun 2009-2018.	Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai kerja sama Program NZEC.	Perbedaannya adalah sumber ini memfokuskan dari periode program NZEC 2009-2018 dan juga sumber ini lebih berfokus kepada Program NZEC, sementara penulis

Nama Penulis & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			lebih memfokuskan periode 2013-2020 serta hambatan dan tantangan dari Program NZEC.
Yuning Nur Asri & Pazli, 2014	Motivasi Cina Menjalin Kerjasama Dengan Uni Eropa Dalam Program <i>Near Zero Emissions Coal</i> (NZEC) 2007-2013	Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai kerja sama Program NZEC.	Perbedaannya adalah dari periode yang dibahas dalam program NZEC yaitu 2007-2013, sementara penulis memfokuskan periode tahun 2013-2020 serta hambatan dan tantangan dari program NZEC.

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai pendukung sumber pada Penelitian ini ialah sebagai berikut:

2.2.1 Politik Hijau / *Green Politics*

Teori hijau internasional melihat perlunya perubahan radikal dalam struktur politik dunia dan membuat pendiriannya untuk menantang tatanan dunia, guna melindungi dunia dari kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Manusia bertanggung jawab untuk melindungi dunia dikarenakan dua alasan, yang pertama ialah bahwa manusia bertanggung jawab atas masalah lingkungan yang dihadapi dunia saat ini dan harus memperbaiki masalah tersebut saat mereka yang menjadi penyebabnya. Kedua, karena manusia memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi seluruh alam semesta dan bentuk kehidupan. Dengan sudut pandang ini, Goodin memaparkan salah satu tujuan yang terpenting dari pemikiran hijau yaitu menjamin pembagian lingkungan yang adil antara spesies dan pencegahan masyarakat yang ingin menggunakan alam hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri (Ari, 2019, hal. 172).

Awal mula perkembangan dari teori hijau ini ialah campuran pengaruh yang dibagi menjadi tiga bidang khusus, diantaranya adalah teknologi/ilmiah, filosofi/etis, dan yang terakhir adalah politik. Yang pertama yaitu teknologi/ilmiah yang mana bidang ini mengacu pada pengetahuan, informasi dan kesadaran akan suatu masalah. Yang kedua, filosofi/etis yang condong pada spekulasi tentang hubungan antara manusia dan alam. Maksudnya adalah, pada situasi ini perilaku manusia menyebabkan permasalahan alam. Ketiga, dari sudut pandang politik yang

lebih mengacu pada formula untuk menciptakan aktivitas dalam mengatasi keadaan darurat yang nyata (Steans *et al.*, 2013, hal. 213). Selanjutnya dalam mengenai teori hijau R.E Goodin juga mengangkat etika sebagai inti dari pandangan politik hijau. Goodin juga menyatakan bahwa “*Green Theory of Value*” berada di pusat teori hijau, dengan menempatkan nilai-nilai sumber daya sebagai fakta yang dihasilkan oleh proses alamiah sejarah, dan bukan semata-mata dipengaruhi oleh peran manusia (Ball, 2008, hal. 534–540).

Pada pertengahan tahun 1970-an, Politik Hijau atau *Green Politics* mengacu pada kesadaran manusia tentang urgensi isu-isu lingkungan dalam konteks politik global. Di antara isu-isu lingkungan tersebut, perubahan iklim menjadi salah satu yang paling signifikan karena dampaknya yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan negara secara keseluruhan (Paterson, 2007, hal. 545–546). Maka, Matthew Paterson mengemukakan konsep *Green Politics* untuk mengkaji dampak isu lingkungan terhadap struktur internasional.

Konsep *Green Politics* memiliki keterkaitan dengan Teori Hijau (*Green Theory*) yang mana teori ini berfokus pada hubungan manusia dengan makhluk lain serta menyinggung masalah pembangunan yang destruktif di dalamnya. *Green Theory* menurut John Barry muncul guna memperbaiki persepsi yang tidak benar jika menganggap manusia sebagai makhluk yang superior di alam. Teori ini mencoba untuk mendekatkan studi mengenai masyarakat manusia dengan kenyataan yang lebih nyata. Dalam menghadapi isu lingkungan yang semakin mengancam, diperlukan respons serius dari pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah (Barry, 2014, hal. 2).

Perkembangan *Green Political Theory* dilihat karena manusia merupakan bagian dari alam, hal ini memiliki konsekuensi bagi perilaku politiknya. Oleh karena itu, teori politik perlu sejalan dengan teori-teori lingkungan, karena didasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Maksudnya di sini adalah manusia bukan hanya dilihat sebagai makhluk sosial atau individu yang rasional akan tetapi sebagai *natural beings*, bahkan lebih jauh sebagai *political animals* (Apriwan, 2011, hal. 41). Kepadanan yang ada antara isu lingkungan dengan teori politik berusaha dicapai dengan adanya kajian *Green Political Theory* dalam kajian teori politik yang kontemporer pada abad ini.

Fokus kuat pada *Green Politics* pada berbagai isu lingkungan jelas menunjukkan bahwa politik berperan dalam upaya perlindungan, yang utamanya melalui berbagai prinsip dan nilai *Green Politics* sebagai keseimbangan penggunaan sumber daya untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan, yang membentuk dasar untuk kebijakan ekologis. Maka dari itu, keberadaan *Green Politics* dianggap sebagai salah satu gagasan yang memberikan *output* positif bagi perkembangan teori sosial politik kontemporer. *Green Politics* juga telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk kebaikan bersama dalam hubungannya dengan gerakan lingkungan. Melalui kesadaran *Green Politics*, para pemimpin bisa menggunakan kekuatan yang mereka miliki sebagai wadah untuk tujuan *environmentalism*. Seperti halnya ratifikasi “Protokol Kyoto” oleh negara-negara industri maju, mengubah target emisi tahun 2008 dan 2012 menjadi pengurangan 5% berdasarkan tingkat tahun 1990 (Jerald Mast, 2013, hal. 735), yang mana merupakan langkah nyata bagi pemerintah untuk melakukan lobi-lobi politiknya untuk mencapai kesepakatan mengenai isu lingkungan tersebut.

Melibatkan peran negara dalam merespons isu lingkungan melalui *Green Politics* akan membentuk sistem yang tanggap terhadap masalah-masalah baru yang terkait dengan isu lingkungan dan juga akan meningkatkan kapabilitas negara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Di seluruh dunia, *Green Politics* berpegang pada prinsip empat pilar, yaitu keadilan sosial (*social equalitu & economic justice*), tanpa kekerasan (*non violence*), demokrasi kerakyatan (*grassroots democracy*), dan ekologi (*ecological sustainability*) (Dani Wahyu Munggoro & Andy Armansyah, 2008, hal. 93). Sebagai contoh lain dari penerapan *Green Politics* adalah pengembangan berbagai kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Sistem *cap-and-trade*, pajak karbon dan pengurangan emisi karbon adalah beberapa contoh instrumen yang berperan penting dalam merespons beragam isu lingkungan, baik di tingkat nasional maupun internasional (Jerald Mast, 2013, hal. 735).

2.2.2 Perubahan Iklim

Perubahan iklim sebutan untuk masalah lingkungan yang sebagian besar dibawa oleh manusia dan salah satu masalah lingkungan paling serius yang dihadapi populasi dunia saat ini (Rahman, 2013, hal. 2). *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menginterpretasikan “perubahan iklim sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami”. Aktivitas yang disebabkan oleh manusia ini digambarkan oleh *World Meteorological Organization* (WMO) bahwa peningkatan gas rumah kaca sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan energi, penumpukan gas rumah kaca di atmosfer mengubah keseimbangan radiasi atmosfer (UNFCCC, 2011).

Berbeda dengan UNFCCC, *Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC) menjelaskan “perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasi (misalnya menggunakan uji statistik) dengan perubahan rata-rata dan/atau variabilitas sifat-sifatnya, dan yang bertahan untuk waktu yang lama, biasanya beberapa dekade atau lebih. Ini mengacu pada setiap perubahan iklim dari waktu ke waktu, baik variabilitas alami atau sebagai akibat dari aktivitas manusia” (IPCC, 2014). Maka dari itu, ditemukan perbedaan definisi antara UNFCCC yang menjelaskan hanya dari aspek manusia dan IPCC yang menjelaskan perubahan iklim dengan cakupan lebih luas.

Saat ini, pemanasan bumi yang terjadi merupakan titik yang sangat penting dikarenakan lebih dari 95 persen kemungkinan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia yang dimulai dari pertengahan abad ke-20. Fenomena ini merupakan tingkat terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa dekade hingga ribuan tahun. Bukan hanya itu saja, penggunaan bahan bakar fosil, seperti minyak, gas alam dan batu bara merupakan aktivitas manusia yang dominannya menjadi penyebab perubahan iklim pada saat ini (Brown, 2019). Hal tersebut dikarenakan pembakaran bahan bakar fosil mengeluarkan emisi gas yang berkontribusi atas pemanasan global seperti gas karbon dioksida, metana dan gas rumah kaca. Serta gas rumah kaca menyumbang secara kolektif sekitar 88 persen terhadap pemanasan global (World Meteorological Organization, 2007). Satu di antara faktor yang terbesar pada terjadinya perubahan iklim ialah kondisi yang disebut sebagai rumah kaca. Karena adanya revolusi industri, konsentrasi gas di atmosfer seiring dengan aktivitas manusia pun meningkat. Suhu bumi yang semakin meningkat yang selanjutnya berefek kepada alam, antara lain yaitu mencairnya es.

Kenaikan suhu permukaan bumi pada periode tahun 1951 hingga 2010 sebesar 0,5°C hingga 1,3°C yang disebabkan oleh gas rumah kaca yang memberikan kontribusi dan memicu terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia. Perubahan iklim yang pada dasarnya memang sesuatu yang alamiah, tetapi tidak sedikit aktivitas-aktivitas manusia yang mempercepat perubahan iklim ini (IPCC, 2013, hal. 33). Dengan pembakaran minyak bumi dan industri semen yang menghasilkan emisi karbon dioksida, jumlah emisi tersebut diiringi dengan kenaikan suhu permukaan bumi yang akan terus mengalami peningkatan. Bahkan skenario terburuknya terjadi kenaikan suhu permukaan bumi sebesar 2°C pada tahun 2100 (IPCC, 2013, hal. 36).

Meskipun perubahan iklim bukanlah hal yang baru, sejak itu, di satu sisi telah dimanifestasikan orang-orang mempercayai bahwa konsekuensi dari aktivitas manusia pada iklim dunia sudah mencapai keadaan yang mengkhawatirkan dan menimbulkan ancaman kritis terhadap struktur fisik dan juga sosial ekonomi (Rahman, 2013). *United Nations Development Programme* memaparkan bahwa perubahan iklim menjadi isu internasional yang kemudian diadopsi sebagai salah satu agenda dari *Sustainable Development Goals* (SDG) pada poin mengenai *Climate Action*. Baik itu negara maju dan negara berkembang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang sama terkait permasalahan tersebut. Karena perubahan iklim merupakan permasalahan global maka upaya mitigasi terhadap perubahan iklim bukan hanya menjadi kewajiban dari sebagian negara. Maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang signifikan dari tujuan yang dicapai maka diperlukan kontribusi dan kerja sama seluas mungkin oleh semua negara dan partisipasi mereka dalam respons internasional yang efektif dan tepat, sesuai

dengan tanggung jawab bersama tetapi dibedakan dan kemampuan masing-masing (United Nations, 1992).

Secara keseluruhan dua teori tersebut memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yang mana kerja sama yang dilakukan Uni Eropa dan China ini memberikan kontribusi nyata dikarenakan mereka yang mempunyai andil yang cukup besar atas kerusakan lingkungan sebagai penyumbang emisi terbesar di dunia. Hal ini akan berdampak langsung pada munculnya Politik Hijau atau *Green Politics* yang merupakan sudut pandang lain dari Hubungan Internasional, sebagai kritik terhadap reaksi pandangan konservatif dalam menghadapi isu-isu lingkungan. Dengan perubahan iklim sebagai isu yang mendesak dan pihak tradisional kehilangan dukungan terhadap berbagai alternatif, kaum hijau diposisikan untuk memainkan peran yang lebih besar dari sebelumnya. Maka dari itu, politik hijau dengan secara tepat meningkatkan efektivitas berbagai perangkat kebijakan dalam menangani isu-isu perubahan iklim serta memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai isu lingkungan di tingkat nasional maupun internasional (Jerald Mast, 2013).

2.2.3 Rezim Internasional

Teori rezim internasional merupakan salah satu teori yang ada dalam ilmu hubungan internasional yang mempelajari mengenai bagaimana kerja sama antar negara dapat terjadi dalam konteks global. Berdasarkan Perritt (1998) dalam Ari (2018), isu-isu antar negara di dunia, baik politik, sosial budaya, ekonomi atau lingkungan, membutuhkan negara-negara yang peduli dengan kesulitan untuk bekerja sama tanpa hegemoni atau perkembangan rezim internasional untuk menemukan jawabannya. Atas dasar ini, rezim internasional tersedia sebagai

instrumen yang dapat membantu penyelesaian sengketa antar negara. Selanjutnya yang mana rezim internasional ini mengurangi ketidakpastian dan memberikan referensi mengenai perilaku mana yang salah atau benar (Ari, 2018, hal. 6).

Menurut Stephen Krasner (1987) dalam Andreas Hasenclever, Peter Mayer (1997) teori rezim internasional sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit di mana ekspektasi para aktor bertemu pada bidang hubungan internasional tertentu. Yang mana prinsip ialah keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran. Selanjutnya, norma yang merupakan standar perilaku yang dideskripsikan dalam hal kewajiban dan hak. Dan terakhir, aturan adalah larangan atau resep khusus untuk suatu tindakan yang diambil. Pada prosedur pengambilan keputusan/tindakan lazimnya berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan yang kolektif (Andreas Hasenclever, Peter Mayer, 1997, hal. 9).

Robert O Keohane memaparkan bahwa rezim internasional adalah alat kerja sama yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kerja sama antar negara bisa terjadi karena saling membutuhkan atau memiliki kepentingan yang sama. Rezim internasional juga merupakan tempat di mana harapan-harapan negara yang terlibat bertemu, dirumuskan, dan musyawarah untuk mencapai kepentingan bersama melalui rezim internasional ini. meskipun rezim internasional adalah bentuk kerja sama antar negara di dunia, tidak semua kerja sama di dunia merupakan rezim, karena kerja sama dapat terjadi tanpa adanya rezim internasional (Hennida, 2015).

Rezim juga dapat meningkatkan kesadaran publik akan kekhawatiran, mengubah cara negara memandang adanya tantangan dan kepentingan mereka dalam menemukan solusi, atau berfungsi sebagai pusat pembelajaran mengenai respons kebijakan. Bukan hanya itu saja, rezim juga dapat berfungsi sebagai forum untuk debat normatif tentang siapa yang harus menanggung biaya tindakan dan apa yang benar untuk dilakukan. Pada keefektifannya, rezim-rezim ini sangat bervariasi dengan menunjukkan pola kerja sama rasional berdasarkan aktor yang memilih untuk tujuan yang ditentukan, sementara yang lain menunjukkan pola kerja sama yang tidak rasional (Hugh Ward, 2004, hal. 151).

Adapun kegagalan upaya kerja sama tertentu dalam politik dunia selalu tersedia bahwa kepentingan negara-negara yang terlibat terkadang tidak sesuai dengan kriteria satu sama lain. Hal ini akan menunjukkan bahwa perselisihan ialah hal yang wajar, apabila tidak dapat dihindari akibat dari karakteristik para aktor dan posisi mereka satu sama lain. Bersama dengan itu, tingkat kerja sama yang rendah atas dasar kepentingan para aktor, tidak ada lagi solusi kooperatif yang akan membuat semua pihak menjadi lebih baik (Pardo, 2017).

Seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), yang termasuk dalam rezim internasional yang membahas perubahan iklim, dibangun di atas pemahaman yang jelas mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh, dan penyebab perubahan iklim. Serta memberikan landasan bagi tindakan multilateral untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya terhadap kemanusiaan dan ekosistem. Tujuan dari UNFCCC itu sendiri untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya pada sistem iklim (United Nations, 1992).

Baik China dan Uni Eropa merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Uni Eropa dan China memiliki sejarah kerja sama yang erat dalam masalah lingkungan dan energi, termasuk perubahan iklim. Kemitraan UE-China tentang Perubahan Iklim menyediakan kerangka kerja politik tingkat tinggi yang akan semakin memperkuat kerja sama ini dan yang menetapkan tindakan baru yang konkret. Melalui kerja sama dengan Uni Eropa, China mengadopsi pendekatan Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi gas karbon. Sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto, China bertanggung jawab untuk mengurangi emisi gas karbon sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam Protokol Kyoto. Maka, kerja sama antara China dan Uni Eropa dalam mengatasi perubahan iklim juga didasarkan pada kesepakatan Protokol Kyoto yang telah disepakati (European Commission, 2005).

2.2.4 Teori *Rational Choice*

Teori pilihan rasional (*rational choice*) merupakan pandangan dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa kepentingan pribadi dan nalar mengatur perilaku manusia. Teori ini menyatakan, individu dan kelompok membuat keputusan berdasarkan analisis biaya-manfaat dari alternatif yang mereka miliki. Hal ini menyiratkan berarti mereka mempertimbangkan potensi manfaat dan biaya dari setiap opsi dan memilih salah satu yang mereka anggap paling menguntungkan. Berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, ekonomi, kriminologi dan sosiologi telah menggunakan teori pilihan rasional. Sebagai contoh, teori ini sering diterapkan pada ilmu politik guna menjelaskan hubungan internasional, pembuatan kebijakan, dan menjelaskan perilaku pemungutan suara. Teori pilihan rasional ini juga dapat digunakan untuk memahami perilaku individu (Buskens, 2015, hal. 901).

Teori pilihan rasional, biasa disebut sebagai teori pilihan atau teori tindakan rasional, ialah teori yang berfungsi untuk memahami dan sering menstimulasikan perilaku individu dan masyarakat serta ekonomi. Teori ini merupakan pusat ilmu politik kontemporer, serta disiplin ilmu lain seperti sosiologi dan filsafat. Menurut Elster (1989) dalam Paternotte (2011), ketika dihadapkan pada beberapa tindakan yang di dalamnya terdapat individu yang melakukan apa yang mereka yakini dan terdapat probabilitas yang besar guna mendapatkan hasil keseluruhan yang terbaik.

Terdapat beberapa poin penting terkait dengan teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Pertama adalah teori pilihan rasional merupakan teori konsekuensialisme yang mengevaluasi tindakan berdasarkan hasil yang dihasilkannya. Kedua, teori pilihan rasional hanya mempertimbangkan keyakinan dan keinginan dalam memprediksi konsekuensi dari tindakan yang tersedia. Ketiga, keinginan dan keyakinan agen atau pembuat keputusan dianggap tetap dan tidak terbuka untuk diskusi. Keempat, seorang agen atau pembuat keputusan menurut teori pilihan rasional tidak selalu memilih tindakan yang secara objektif optimal, hal ini dikarenakan optimalitas yang ditentukan oleh keinginan agen tersebut. Kelima, teori pilihan rasional tidak mengasumsikan bahwa agen atau pembuat keputusan selalu egois, melainkan pilihan mereka didasarkan pada keinginan mereka sendiri, sehingga preferensi sosial atau altruistik juga dapat diperhitungkan dalam teori ini (Paternotte, 2011, hal. 307–308).

Dalam konteks hubungan internasional, teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa negara merupakan aktor rasional yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya. Kerja sama antar negara dipandang sebagai hasil dari perundingan ide dan manfaat yang rasional (Andrew H. Kydd, 2008, hal. 433). Ketika

diterapkan pada kerja sama, teori ini dikaitkan bahwa tantangan dan hambatan dapat muncul karena kepentingan pribadi yang melekat dan perilaku strategis dari para aktor.

Menurut Mohtar Mas'oeed (1998) dalam Rinayuhani (2017), teori ini berdasarkan pada asumsi mengenai nilai-nilai dan melakukan penilaian berdasarkan biaya dan manfaatnya (baik dan buruk ataupun untung dan rugi) dari kebijakan yang ada. Rasionalitas ini mengacu pada biaya dan manfaat (*cost and benefit*) atau yang disebut oleh Robert Axelrod sebagai *payoff structure*, hal ini merumuskan bahwa jika rasionalitas dipahami sebagai pertimbangan untung-rugi, maka seseorang dapat membuat keputusan yang paling menguntungkan sesuai dengan alternatif yang dianggapnya untuk kepentingannya baik dari pihak individu maupun kelompok. (Rinayuhani, 2017, hal. 1921).

Dalam konteks *payoff structure* yang mempengaruhi tingkat kerja sama yaitu preferensi bersama dan konflik (*mutual and conflicting preferences*) (Robert Axelrod & Robert O. Keohane, 1985, hal. 228). *Payoff structure* ini sebagai representasi dari hasil suatu tindakan yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa, seperti persepsi aktor mengenai kepentingan mereka juga turut mempengaruhi dan bahkan dalam beberapa kasus tidak hanya bergantung pada tujuan akhir yang diinginkan oleh aktor, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana mereka memandang manfaat dan biaya dari pilihan yang ada (Alpizar *et al.*, 2019, hal. 1283).

2.3 Asumsi

Penulis merumuskan asumsi sebagai landasan untuk menentukan alur penelitian. Asumsi ialah landasan berpikir peneliti dalam bentuk pernyataan yang dibangun berdasarkan postulat. Asumsi merupakan dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya oleh peneliti, adapun asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **Bahwa dengan sulitnya pengimplementasian program *Near Zero Emission Coal* oleh Uni Eropa dan China dikarenakan terdapat hambatan dan tantangan yaitu biaya yang dikeluarkan tidak sepadan dengan proses pengerjaan program, ketidakpastian operasional, kurangnya data emisi gas rumah kaca dan kurangnya skenario transisi serta kerangka kebijakan dan peraturan lingkungan yang kurang aman dan kurang stabil.**

2.4 Kerangka Analisis

